



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022



KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN



PEMERINTAH KOTA DUMAI
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
JALAN RAYA LUBUK GAUNG
DUMAI - RIAU

SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN DAN KEBENARAN DATA LAPORAN LKj-IP

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
NIP : 19820630 200604 1 013
Pangkat / Gol. Ruang : PENATA TK.I (III/d)
Jabatan : CAMAT
Unit Organisasi : KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala data yang terdapat dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-IP) ini adalah Benar berdasarkan data Un Audit per tanggal 31 Desember 2022 yang bersumber pada :

1. RPJMD 2021-2026 Kota Dumai
2. Laporan SPJ Fungsional pada SIPKD Kecamatan Sungai Sembilan
3. DPPA Kecamatan Sungai Sembilan Tahun Anggaran 2022

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dumai, Januari 2023

CAMAT SUNGAI SEMBILAN


HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
PENATA TK.I
NIP. 19820630 200604 1 013

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Sembilan Tahun Anggaran 2022

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Sembilan adalah merupakan suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi yang berguna untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan tugas, wewenang dan sumber daya yang telah dimanfaatkan.

Laporan Kinerja (LKj) ini dibuat dengan berpedoman kepada Rencana Strategi Kecamatan Sungai Sembilan 2021-2026 yang berupa Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta pokok-pokok Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2026. Dengan Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan terlihat hal-hal mana yang perlu untuk diperbaiki dan mana yang perlu ditingkatkan untuk masa yang akan datang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Sungai Sembilan lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan Good Governance.

Dumai, Januari 2023

CAMAT SUNGAI SEMBILAN

KECAMATAN
SUNGAI SEMBILAN
* **HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si**
PENATA TK.I
NIP. 19820630 200604 1 013

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Isu Strategis	2
1.3 Struktur Organisasi.....	3
1.4 Dasar Hukum	4
1.5 Sistematika Pelaporan	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	7
1. Visi	7
2. Misi.....	7
3. Tujuan	7
4. Sasaran	8
5. Strategi dan Kebijakan	8
6. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	13
B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Keuangan	20
BAB IV PENUTUP	24
Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 beserta Lampiran	
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 beserta Lampiran	
3. Rencana Kerja Tahunan 2022	
4. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	
5. Evaluasi Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2022	
6. Rencana Aksi Perubahan Tahun Anggaran 2022	

DAFTAR TABEL

TABEL	URAIAN	HALAMAN
TABEL II.1	KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	8
TABEL II.2	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	9
TABEL II.3	PENJELASAN MISI DENGAN TUJUAN	10
TABEL II.4	PENJELASAN MISI DENGAN STRATEGI	11
TABEL II.5	PENJELASAN MISI DENGAN ARAH KEBIJAKAN	11
TABEL II.6	SASARAN PRIORITAS PROGRAM	12
TABEL II.7	PERJANJIAN KINERJA	13
TABEL III.1	CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA	15
TABEL III.2	TABEL PENGUKURAN KINERJA	17
TABEL III.3	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN SKPD	21
TABEL III.4	MATRIKS PERMASALAHAN SERTA LANGKAH ANTISIPATIF	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintahan Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/ atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Kecamatan Sungai Sembilan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan semangat menuju **“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu ”** dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Kecamatan Sungai Sembilan telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2022.

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2022 adalah :

- 1 . Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan ;
- 2 . Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran ;
- 3 . Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya ;
- 4 . Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang ; dan
5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Isu Strategis

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan Kelurahan/masyarakat, Kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah Kota. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak Kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya Kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa Kecamatan adalah “Kota Kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini Kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Walikota.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan

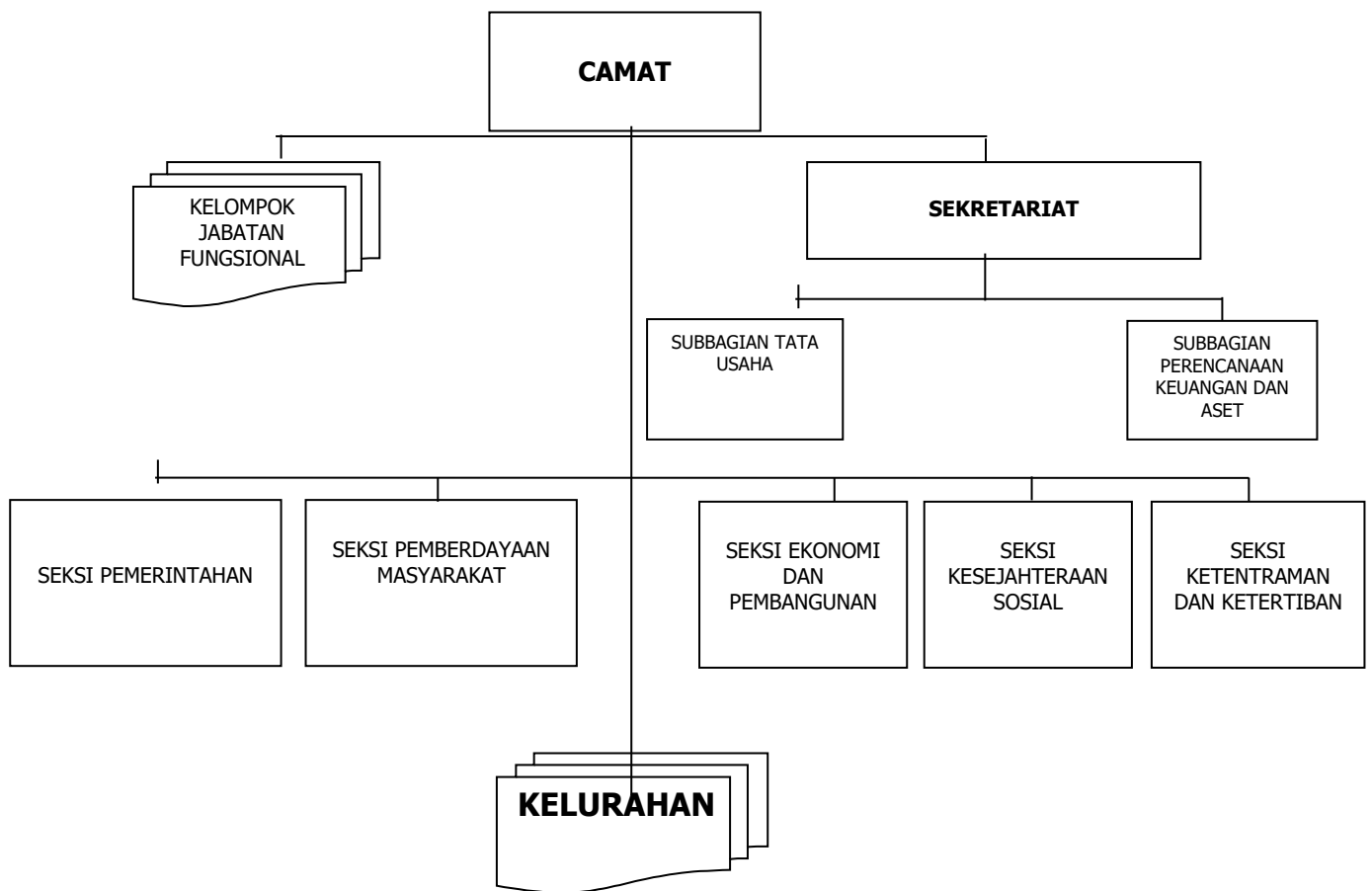
harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Meskipun di tingkat Kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak Kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak Kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Nomor 17 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Kelurahan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN



1.4 Dasar Hukum

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme;
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme;
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor. 08 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021.
- Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor. 02 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021.

1.5 Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai terdiri dari beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai, maksud dan tujuan LKj 2021 serta sistematika pelaporan

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja secara singkat diantaranya Visi, Misi dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator keberhasilan pencapaiannya.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Merupakan inti dari LKj yang menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,

hambatan/ kendala, permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang telah diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan selama tahun 2022.

Bab IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Visi

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kantor Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, adalah :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Kokoh, Dengan Masyarakat Yang Bertumpu Pada Budaya Melayu ”

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kantor Kecamatan Sungai Sembilan sebagai lembaga yang berkopeten dalam pelayanan prima dan professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif.

2. Misi

Upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Dumai akan dicapai melalui misi pembangunan daerah yaitu **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik :**

3. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah **Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Sungai Sembilan adalah **Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan.**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel II.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu ”

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik	Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan.

5. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan.

Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Sembilan, strategi yang ditempuh adalah :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan
 3. Meningkatkan Kinerja Pemerintah daerah yang didukung dengan profesionalitas aparatur yang berkarakter melayani.
 4. Memperkuat kelembagaan pengembangan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat
- Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Sungai Sembilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :
1. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
 2. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur berbasis kompetensi dan kinerja
 3. Pengalokasian Anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan pada kecamatan

TABEL II.2

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU			
MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN DAERAH YANG BAIK			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
			2. Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
			3. Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
		2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan
		3. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		

**TABEL II.3
PENJELASAN MISI DENGAN TUJUAN
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN TAHUN 2022**

NO	MISI	TUJUAN	PENJELASAN TUJUAN
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Menciptakan kinerja, disiplin dan profesionalisme pegawai. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesionalisme didalam menyelenggarakan organisasi Kecamatan, Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya lembaga masyarakat Kelurahan.

**TABEL II.4
PENJELASAN MISI DENGAN STRATEGI
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN TAHUN 2021**

NO	MISI	STRATEGI	PENJELASAN STRATEGI
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas pelayanan dasar dan non dasar 2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah daerah yang didukung dengan profesionalitas apartur yang berkarakter melayani. 3. Memperkuat kelembagaan pengembangan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 	Memberikan Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya lembaga masyarakat serta Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

**TABEL II.5
PENJELASAN MISI DENGAN ARAH KEBIJAKAN
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN TAHUN 2021**

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PENJELASAN TUJUAN
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja dalam meningkat Kinerja Aparatur dan Meningkatkan Pengawasan dalam penyelenggaraan Organisasi
		1. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Meningkatkan Kinerja Sumber daya lembaga masyarakat
		3. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Mendorong terwujudnya ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Sungai Sembilan
		4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesionalisme didalam menyelenggarakan organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

**TABEL II.6
SASARAN PRIORITAS PROGRAM
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN TAHUN 2022**

NO	SASARAN PRIORITAS PROGRAM SKPD	JUMLAH PROGRAM
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	1 Program
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	1 Program
3	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	1 Program
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1 Program
	JUMLAH	4 Program

6. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Berbagai program telah dilaksanakan di Tahun Anggaran 2022 dalam rangka untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan tugas urusan kewilayahan yang telah di serahkan kepada Camat, sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

Strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan dari misi yang dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program yaitu antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance dan clean government)
2. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan

B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2022 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021 – 2026. Penetapan Kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai untuk mencapainya dalam tahun 2022, Rencana Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**TABEL II.7
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN TAHUN 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87
	b. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
	c. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100

Penjelasan alokasi anggaran per sasaran strategis sebagai Berikut.

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022 pada Kecamatan sungai Sembilan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan*” adalah sebagai berikut

:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	87 %	86.98 %
	b. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	93,16 %
	c. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %	99,55 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan (PKK), dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, dan juga untuk mengetahui hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran.

Secara rinci pengukuran capaian kinerja / sasaran masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan pada dibawah ini :

**TABEL III.1
CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN TAHUN 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUN 2022
1	2		3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	a	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	86,98
	b	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100	93,16
	c	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100	99,55

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL III.2
TABEL PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
TAHUN 2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2021	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN S/D 2022 TERHADAP RENSTRA 2021-2026 (%)
			TARGET TAHUNAN (%)	REALISASI TAHUN 2022 (%)	REALISASI (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat		87	86,98	99,98	89	19,77
2.	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum		100	93,16	93,16	100	18,63
3.	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat		100	99,99	99,55	100	19,91

Dari Tabel Pengukuran Kinerja SKPD Tahun 2022 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

A.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

- a. Indikator Kinerja Sasaran : **Indeks Kepuasan Masyarakat** Target tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 87%, Capaian tahun 2022 adalah 86.98 % atau sebesar 99.98%.
- b. Indikator Kinerja Sasaran : **Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum** Target tahun 2022 Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum adalah 100%, Capaian tahun 2022 adalah 93,19 % atau sebesar 93,19%.
- c. Indikator Kinerja Sasaran : **Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat** Target tahun 2022 **Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat** adalah 100%, Capaian tahun 2022 adalah 99,55 % atau sebesar 99,55%.

A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2022) dengan tahun lalu (2021)

- a. Indikator Kinerja Sasaran : **Indeks Kepuasan Masyarakat**
Pada tahun 2022 *Indeks Kepuasan Masyarakat* adalah sebesar 86.98 %, sedangkan Capaian tahun 2021 Indikator Kerja Sasaran tidak sama dengan Tahun 2022 karena adanya Perubahan Indikator Kerja Sasaran pada RPJMD 2021 - 2026.
- b. Indikator Kinerja Sasaran : **Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum**
Pada tahun 2022 Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum adalah sebesar 93,16%, sedangkan Capaian tahun 2021 Indikator Kerja Sasaran tidak sama dengan Tahun 2022 karena adanya Perubahan Indikator Kerja Sasaran pada RPJMD 2021 - 2026

- c. Indikator Kinerja Sasaran : **Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat.**

Pada tahun 2022 Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat adalah sebesar 99,55%, sedangkan Capaian tahun 2021 Indikator Kerja Sasaran tidak sama dengan Tahun 2022 karena adanya Perubahan Indikator Kerja Sasaran pada RPJMD 2021 - 2026

A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2021) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

- a. Indikator Kinerja Sasaran : **Indeks Kepuasan Masyarakat** Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sebesar 19,77 % dari target yang ditetapkan
- b. Indikator Kinerja Sasaran : **Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum** Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sebesar 18,63 % dari target yang ditetapkan
- c. Indikator Kinerja Sasaran : **Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat.** Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sebesar 19.91 % dari target yang ditetapkan.

A.4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja atau permasalahan dan alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Keberhasilan/Peningkatan ini diatas tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak. Upaya -upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. REALISASI KEUANGAN

Secara keseluruhan Kecamatan Sungai Sembilan telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. **10.869.637.137,-** dengan realisasi penyerapan sebesar Rp **10.471.023.827,-** atau **96.33%**. Gambaran realisasi kinerja dan Anggaran Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2022 di sajikan dalam tabel berikut ini :

TABEL III.3
TABEL REALISASI ANGGARAN
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi s/d Bulan Desember 2022	Sisa Pagu Anggaran	Persentase
1	2	3	13(6+9+12)	14(3-13)	
7.01.7.01.0.001.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82,508,800.00	81,716,800.00	792,000.00	99.04
7.01.7.01.0.001.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,523,600.00	2,523,600.00	0.00	100.00
7.01.7.01.0.001.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,523,600.00	2,379,600.00	144,000.00	94.29
7.01.7.01.0.001.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,523,600.00	2,379,600.00	144,000.00	94.29
7.01.7.01.0.001.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,523,600.00	2,379,600.00	144,000.00	94.29
7.01.7.01.0.001.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,523,600.00	2,379,600.00	144,000.00	94.29
7.01.7.01.0.001.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69,890,800.00	69,674,800.00	216,000.00	99.69
7.01.7.01.0.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,570,501,733.00	6,209,982,908.00	360,518,825.00	94.51
7.01.7.01.0.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,565,794,333.00	6,205,611,508.00	360,182,825.00	94.51
7.01.7.01.0.001.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,055,000.00	2,839,000.00	216,000.00	92.93
7.01.7.01.0.001.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,652,400.00	1,532,400.00	120,000.00	92.74

7.01.7.01.0.001.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25,359,000.00	25,239,000.00	120,000.00	99.53
7.01.7.01.0.001.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,542,000.00	1,482,000.00	60,000.00	96.11
7.01.7.01.0.001.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23,817,000.00	23,757,000.00	60,000.00	99.75
7.01.7.01.0.001.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	100.00
7.01.7.01.0.001.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	100.00
7.01.7.01.0.001.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405,817,664.00	394,999,244.00	10,818,420.00	97.33
7.01.7.01.0.001.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,793,000.00	15,793,000.00	0.00	100.00
7.01.7.01.0.001.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113,204,064.00	113,194,700.00	9,364.00	99.99
7.01.7.01.0.001.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,664,800.00	3,650,000.00	14,800.00	99.60
7.01.7.01.0.001.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91,513,300.00	84,022,000.00	7,491,300.00	91.81
7.01.7.01.0.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47,076,500.00	46,731,300.00	345,200.00	99.27
7.01.7.01.0.001.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,216,000.00	7,712,000.00	1,504,000.00	83.68
7.01.7.01.0.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125,350,000.00	123,896,244.00	1,453,756.00	98.84
7.01.7.01.0.001.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44,313,200.00	44,090,062.00	223,138.00	99.50
7.01.7.01.0.001.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44,313,200.00	44,090,062.00	223,138.00	99.50
7.01.7.01.0.001.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,263,496,240.00	2,250,019,291.00	13,476,949.00	99.40
7.01.7.01.0.001.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,510,000.00	3,507,500.00	2,500.00	99.93
7.01.7.01.0.001.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,550,000.00	73,045,191.00	1,504,809.00	97.98
7.01.7.01.0.001.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	100.00
7.01.7.01.0.001.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,165,436,240.00	2,153,466,600.00	11,969,640.00	99.45
7.01.7.01.0.001.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48,845,000.00	48,684,722.00	160,278.00	99.67
7.01.7.01.0.001.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,405,000.00	46,244,722.00	160,278.00	99.65
7.01.7.01.0.001.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,440,000.00	2,440,000.00	0.00	100.00
7.01.7.01.0.002.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,546,900.00	5,546,900.00	0.00	100.00
7.01.7.01.0.002.2.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,546,900.00	5,546,900.00	0.00	100.00

7.01.7.01.0.002.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29,882,600.00	29,881,000.00	1,600.00	99.99
7.01.7.01.0.002.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29,882,600.00	29,881,000.00	1,600.00	99.99
7.01.7.01.0.003.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,201,866,000.00	1,196,305,600.00	5,560,400.00	99.54
7.01.7.01.0.003.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26,894,400.00	26,886,000.00	8,400.00	99.97
7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00	0.00	100.00
7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32,448,000.00	27,040,000.00	5,408,000.00	83.33
7.01.7.01.0.003.2.02.04.	Evaluasi Kelurahan	2,523,600.00	2,379,600.00	144,000.00	94.29
7.01.7.01.0.003.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	86,000,000.00	85,893,500.00	106,500.00	99.88
7.01.7.01.0.003.2.03.03.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	86,000,000.00	85,893,500.00	106,500.00	99.88
7.01.7.01.0.004.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,000,000.00	93,164,800.00	6,835,200.00	93.16
7.01.7.01.0.004.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100,000,000.00	93,164,800.00	6,835,200.00	93.16
	JUMLAH	10,869,637,137.00	10,471,023,827.00	398,613,310.00	96.33

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis mengenai akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan di atas, untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi tersebut diperlukan langkah antisipatif, diuraikan melalui tabel matriks sebagai berikut :

Tabel III.4

**MATRIKS PERMASALAHAN SERTA LANGKAH ANTISIPATIF
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN TAHUN 2022**

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIINGINKAN	LANGKAH ANTISIPATIF
1	Terbatasnya sumber daya manusia atau aparatur di kelurahan sehingga ada beberapa kelurahan yang tidak melaksanakan kegiatan Dana Kelurahan tersebut.	Terpenuhinya Pejabat dan Aparatur di Kelurahan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan diimbangi dengan kualitas pengembangan diri, mengingat bahwa Kelurahan kini telah memiliki anggaran.	Pembinaan kepada SDM di Kecamatan dan Kelurahan dilakukan secara antisipatif, dengan menerapkan sistem reward and punishment di Kecamatan Sungai Sembilan. Selain itu diperlukan pembinaan secara keseluruhan dalam pemahaman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan anggaran dan perencanaan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 OPD Kecamatan Sungai Sembilan sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Dumai sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait; serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Langkah–langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan Laporan Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai khususnya pada Kecamatan Sungai Sembilan .

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 OPD Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai ini kami susun sebagai laporan sekaligus pertanggungjawaban kepada Bapak Walikota Dumai.

CAMAT SUNGAI SEMBILAN



HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
Penata Tk.I
NIP. 19820630 200604 1 013



**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
KOTA DUMAITAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
Jabatan : CAMAT SUNGAI SEMBILAN
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS
Jabatan : WALIKOTA DUMAI
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan sertakan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2022

PIHAK KEDUA
WALIKOTA
H. PAISAL, SKM, MARS


PIHAK PERTAMA
CAMAT
HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19820630 200604 1 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan	%	100

Sasaran 1 : **Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan**

1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	35.429.500
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Rp.	5.546.900
1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Rp.	0
1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan		29.882.600
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Rp.	1.205.866.000
2,1	Pemberdayaan Kelurahan	Rp.	1.205.866.000
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Rp.	0
3,1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	Rp.	0
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Rp.	0
4,1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Rp.	0
	JUMLAH	Rp.	1.241.295.500



 Pihak Kedua
WALIKOTA DUMAI

H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, Januari 2022
 Pihak Pertama
CAMAT


HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
 NIP. 19820630 200604 1 013



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si

Jabatan : CAMAT SUNGAI SEMBILAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan sertakan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS.

PIHAK PERTAMA

HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 198206302006041013

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100

Sasaran 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan

1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	dan	Rp.	35.429.500
	Koordinasi			
1.1	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp.	5.546.900
1.2	Pelaksanaan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Urusan yang Kepada	Rp.	29.882.600
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	dan	Rp.	1.201.866.000
2.1	Pemberdayaaan Kelurahan		Rp.	1.201.866.000
	JUMLAH		Rp.	1.237.295.500

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
WALIKOTA DUMAI



H. PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA
CAMAT SUNGAI SEMBILAN



HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19820630 200604 1 013

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	87
2	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%
3	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%

Dumai, Januari 2022

CAMAT



HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19820630 200604 1 013

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
		2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100

Dumai, Januari 2022

CAMAT



HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19820630 200604 1 013

**EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**

No.	INDIKATOR	TAHUN 2022												CAPAIAN S/D 2022
		TARGET						REALISASI						
		2022	2023	2024	2025	2026	JUMLAH	2022	2023	2024	2025	2026	JUMLAH	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	88	88	88	89	440	86.98	0	0	0	0	86.98	19.77
2	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	100	100	100	100	500	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	93.16	18.63
3	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	100	100	100	100	500	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	99.55	19.91

Dumai, 30 Desember 2022

CAMAT

HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
 NIP. 19820630 200604 1 013

**EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**

No.	INDIKATOR	TAHUN 2022												CAPAIAN S/D 2022
		TARGET						REALISASI						
		2022	2023	2024	2025	2026	JUMLAH	2022	2023	2024	2025	2026	JUMLAH	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	88	88	88	89	440	86.98	0	0	0	0	86.98	19.77
2	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	100	100	100	100	500	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	93.16	18.63
3	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	100	100	100	100	500	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	99.55	19.91

Dumai, 30 Desember 2022

CAMAT



HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19820630 200604 1 013

**EVALUASI RENCANA AKSI PERUBAHAN
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	KINERJA 2022			Kegiatan	Indikator Kegiatan	KEUANGAN 2022		
				Target	Realisasi	%			Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	86.98	99.98	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,546,900	5,546,900	100.00
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100	93.16	93.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100,000,000	93,164,800	93.16
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	%	100	99.55	99.55	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	29,882,600	29,881,000	99.99
							Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	1,201,866,000	1,196,305,600	99.54
									1,337,295,500	1,324,898,300	

Dumai, Desember 2022

CAMAT



HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19820630 200604 1 013